

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman. (1991). *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. (1976). *Masalah-Masalah Hak-Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center).
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. (2010). *Penelitian Kualitatif. Komuni-kasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunanegara. (2008). *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mahendra, O. (1996). *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Oloan Sitorus, D. L. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Salindeho, J. (1993). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, M. I. (2015). *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.

Jurnal :

- Anugrah, F. N. (2016). "Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Hukum*, Vol. 8, No. 2.

- Ansyari, A. N. (2017). "Penetapan Lokasi Dan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Ecosystem*, Vol. 17, No. 3.
- Edy, H., Baiquni, M., & Triatmodjo, B. (2019). "Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (Jjls) Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta". *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No. 1.
- Hidayati, R. (2016). "Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014)". *Online Mahasiswa*, Vol. 3, No. 2.
- Kusno. (2017). "Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu". *Ilmiah*, Vol. 05, No. 2.
- Martinus Siki, M. R. (2015). "Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Desa Galuga Bogor akibat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Hukum". *Living Law*, Vol. 7, No. 2.
- Nofitasari, T. (2016). "Persepsi Masyarakat Kepesisiran Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul terhadap Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul". *Fakultas Geografi*, Vol. 5, No. 3.
- Prihantoro, R. (2015). "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Tinjau dari Teori Hukum Pembangunan". *Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5, No. 2.
- Sharon V. Sumampouw. (2019). "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012". *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 9.
- Simanjuntak, M. N. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Berhak Atas Tanah dalam Hal Ganti Kerugian UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Premise Law*, Vol. 10, No. 2.

Tesis :

- Mohammad Paurindra Ekasetya, 2015. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)". Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Internet :

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan diakses tanggal 12 februari 2020 pukul 08.46 WIB. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/profil-kabupaten-kulonprogo>.

Wawancara :

Fajar Yuniarto, Sekertaris Bidang Pengadaan Tanah, hasil wawancara di Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY, 5 Maret 2020.

M. Zaki Hidayat, Staff Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, hasil wawancara di kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Yogyakarta, 25 Februari 2020.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda yang berada di atasnya

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dalam pasal 1 angka 2 tentang Pengadaan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 paragraf 2 Pasal 12 Tentang Jalan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 2017 No. 280/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.